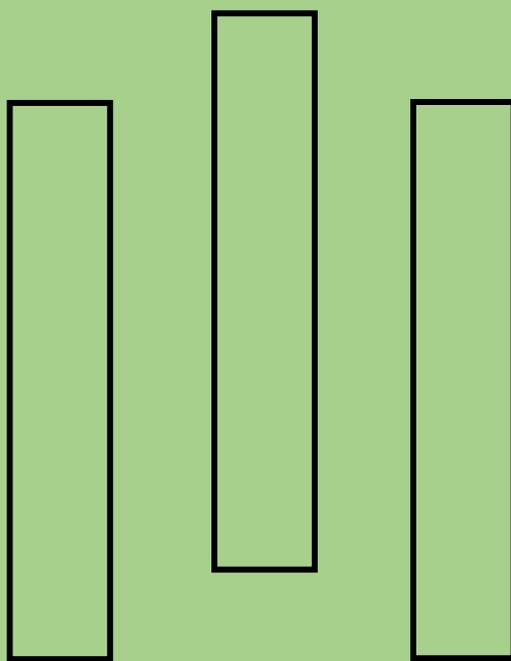


PERJANJIAN KINERJA (PK)  
TAHUN 2023

DP3A



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
JL. MANGUNSARKORO NO 31 KOTA PALU**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	- Indeks Reformasi Birokrasi	64%
2	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan dan Hak Perempuan/Anak serta Peningkatan Kualitas Keluarga	- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	78.95
		- Indeks Perlindungan Anak (IPA)	54.05
3	Meningkatnya Kesetaraan Gender	- Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	4
4	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	- Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	53.00
		- Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	60.60

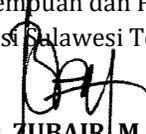
PROGRAM : DINAS	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 13,022,300,436.00	Sumber dana yang digunakan pada semua program ini adalah APBD. DAK NF
2. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 2,026,696,650.00	
3. Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 2,817,283,150.00	
4. Perlindungan Khusus Perempuan	Rp 500,000,000.00	
5. Perlindungan Khusus Anak	Rp 832,499,775.00	
6. Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp 924,999,900.00	
7. Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp 475,000,000.00	
<b>PROGRAM : UPT PPA</b>		
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 213,244,000.00	
2. Perlindungan Khusus Perempuan	Rp 330,354,400.00	
3. Perlindungan Khusus Anak	136,851,600	
<b>TOTAL</b>	<b>Rp 21,279,229,911.00</b>	

Gubernur Sulawesi Tengah



**H. RUSELI ASTURA**

Palu, 2 Mei 2023  
Kepala Dinas  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Provinsi Sulawesi Tengah



**Dr. ZUBAIR, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19701009 199993 1 003

## LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 UNIT KERJA : SEKRETARIAT  
 TAHUN ANGGARAN : 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A	MENINGKATNYACAPAIAN NILAI SAKIP, INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT, DAN PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	- Nilai Sakip	77%
		- Persentase Realisasi Anggaran	97%
		- Indeks Kepuasan Masyarakat	85%
1	Terlaksananya Perencanaan , Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Perencanaan , Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan
	- Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen
	- Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	- Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD	1 Dokumen
	- Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan
2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	5 Laporan
	- Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan/Orang
	- Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen
	- Terlaksananya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	- Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen
	- Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan /Semester SKPD	- Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan /Semester SKPD	3 Laporan
	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Penyusunan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan
3	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan
	- Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	- Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	134 Buah
4	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Laporan
	- Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket
	- Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
5	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2Laporan
	- Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit
	- Tersedianya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit
6	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Laporan
	- Tersedianya Jasa Surat Menyurat	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
	- Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan
	- Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan

7	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan
	- Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	38 Unit
	- Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan yang dipelihara, Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit
	- Terpeliharanya Terehabilitasinya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang Dipelihara Direhabilitasi	3 Unit

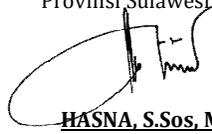
PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 13,022,300,436.00	Sumber dana yang digunakan pada semua program ini adalah APBD.
1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Rp 423,553,600.00	
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 35,542,000.00	
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 33,419,600.00	
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 354,592,000.00	
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 9,731,381,909.00	
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 8,210,030,359.00	
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 1,309,230,000.00	
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp 92,969,700.00	
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 69,151,850.00	
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 50,000,000.00	
3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 127,540,538.00	
4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1,349,741,425.00	
5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 337,675,064.00	
6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 345,241,700.00	
7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Rp 707,166,200.00	

Kepala Dinas  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Provinsi Sulawesi Tengah



**Dr. ZUBAIR, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19701009 199993 1 003

Palu, 2 Mei 2023  
Sekretaris  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Provinsi Sulawesi Tengah



**HASNA, S.Sos, M.A.P**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19711121 200012 2 001

## LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 UNIT KERJA : SEKRETARIAT  
 SUB UNIT KERJA : SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM  
 TAHUN ANGGARAN : 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A	MENINGKATNYACAPAIAN NILAI SAKIP, INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT, DAN PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	- Indeks Kepuasan Masyarakat	85
1	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan
	- Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	- Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	134 Buah
2	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Laporan
	- Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan Terselenggaranya Rapat Koordinasi	1 Paket
	- Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
3	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Laporan
	- Tersedianya Jasa Surat Menyurat	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan
	- Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan
	- Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 127,540,538.00	Sumber dana yang digunakan pada semua Kegiatan ini adalah APBD
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 127,540,538.00	
2 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1,349,741,425.00	
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 32,114,325.00	
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 1,317,627,100.00	
3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 345,241,700.00	
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 34,584,900.00	
- Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 169,994,000.00	
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 26,863,770.00	
- Penyediaan Jasa Peralatan Umum Kantor	Rp 113,799,030.00	
<b>Total</b>	Rp <u>1,822,523,663.00</u>	

  
 Sekretaris  
 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
 Provinsi Sulawesi Tengah  
**HASNA S.Sos, M.A.P**  
 Penata Tingkat 1  
 NIP. 19711121 200012 2 001

Palu, 2 Mei 2023  
 Kepala Sub Bagian  
 Kepegawaian dan Umum  
  
**MUSTAKIM, SH**  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 19690714 200701 1 025

## LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 UNIT KERJA : SEKRETARIAT  
 SUB UNIT KERJA : SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET  
 TAHUN ANGGARAN : 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	MENINGKATNYACAPAIAN NILAI SAKIP, INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT, DAN PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	Persentase Realisasi Anggaran	97
1	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Keuangan Perangkat	12 bulan
	- Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan/Orang
	- Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen
	- Terlaksananya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	- Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen
	- Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan /Semester SKPD	- Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan /Semester SKPD	3 Laporan
	- Terlaksananya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- Jumlah Laporan Penyusunan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen
2	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan
	- Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit
	- Tersedianya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit
3	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan
	- Tersedianya Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	38 Unit
	- Tersedianya Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan yang dipelihara , Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit
	- Terpeliharanya Terehabilitasinya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang Dipelihara Direhabilitasi	3 Unit

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 9,731,381,909.00	Sumber dana yang
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 8,210,030,359.00	digunakan pada
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 1,309,230,000.00	semua Kegiatan ini
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan	Rp 92,969,700.00	adalah APBD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 69,151,850.00	
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 50,000,000.00	
2 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 337,675,064.00	
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Rp 68,888,834.00	
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 268,786,230.00	
3 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp 707,166,200.00	
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Rp 22,336,200.00	
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 324,550,000.00	
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Rp 360,280,000.00	
<b>Total</b>	<b>10,776,223,173.00</b>	

  
 Sekretaris  
 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
 Provinsi Sulawesi Tengah  
**HASNA, S.Sos. M.A.P**  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 198511121 200012 2 001

Palu, 2 Mei 2023  
 Kepala Sub Bagian  
 Keuangan dan Aset  
  
**RANI ABELIA, SE, MM**  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 19850502 201101 2 005

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 UNIT KERJA : BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA  
 TAHUN ANGGARAN : 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	<b>MENINGKATNYA KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PARLEMEN</b>	- Persentase Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPR	<b>30,67</b>
	<b>MENINGKATNYA PEMENUHAN 7 PRASYARAT PUG KAB/KOTA</b>	- Persentase Kab /Kota Yang Memenuhi 7 Prasyarat PUG	<b>15,38</b>
	1 Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen Pelembagaan pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	4 dokumen
	- Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	- Jumlah dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	1 dokumen
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	1 dokumen
	- Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Pemerintah	- Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	20 Perangkat Daerah
	- Terlaksananya sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) bagi Organisasi Pemerintah Kewenangan Provinsi	- Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	20 Perangkat Daerah
	2 Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan	2 Dokumen
	- Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen
	- Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi kepada Organisasi Masyarakat di Kabupaten /Kota	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabupaten /Kota	20 Perangkat Daerah
	3 Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	3 Laporan
	- Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada organisasi Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Laporan
	Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	1 Laporan
	- Tersedianya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Tersedia	1 Laporan

<b>B</b>	<b>MENINGKATNYA PERAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA</b>	<b>Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Keluarga</b>	31,29
1	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	<b>Jumlah Laporan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak kewenangan provinsi</b>	2 Laporan
-	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten /Kota	<b>Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten /Kota</b>	20 Stakeholder
-	Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	- Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	1 Laporan
2	Terlaksananya Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten /Kota	- Jumlah Laporan penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kabupaten/kota	1 Laporan
-	Terlaksananya penyediaan layanan komperhensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten /Kota	- Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten /Kota	1 Laporan

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
<b>A. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</b>	<b>Rp 2,026,696,650.00</b>	APBD
1 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Rp 762,393,650.00	
- Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Rp 145,847,350.00	
- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Rp 322,402,700.00	
- Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Rp 294,143,600.00	
2 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	Rp 789,367,250.00	
- Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Rp 402,322,150.00	
- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan	Rp 387,045,100.00	
3 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Rp 474,935,750.00	
- Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Rp 183,750,000.00	
- Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Rp 291,185,750.00	
<b>B. Peningkatan Kualitas Keluarga</b>	<b>Rp 2,817,283,150.00</b>	APBD
1 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Rp 2,778,783,150.00	
- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Rp 373,390,650.00	
- Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Rp 2,405,392,500.00	
2 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp 38,500,000.00	
- Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp 38,500,000.00	
<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp 4,843,979,800.00</b>	

Kepala Dinas  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi  
Sulawesi Tengah  
ZUBAIR, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19701009 199003 1 003

Palu, 2 Mei 2023  
Kepala Bidang  
Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas  
Keluarga  
IRMAWATI SAHI, SE, M.Sc  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19750421 200012 2 005

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 UNIT KERJA : BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK  
 TAHUN ANGGARAN : 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A.</b>	<b>MENINGKATNYA LAYANAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN</b>	- <b>Persentase Kabupaten yang Membentuk DRPPA</b>	<b>16,67</b>
	1 Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen
	- Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	1 dokumen
	- Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	25 Perangkat Daerah
	2 Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	4 Laporan
	- Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	- Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	1 Laporan
	- Tersedianya Kebutuhan spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	30 Orang
	- Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30 Org
	- Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten /Kota	1 dokumen
<b>B</b>	<b>MENINGKATNYA LAYANAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK</b>	<b>Persentase Kab/Kota yang Membentuk PATBM</b>	<b>23,08</b>
	1 Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kab/kota	2 Dokumen
	- Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	30 Organisasi
	- Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen
	2 Terlaksananya Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi	4 Dokumen
	- Tersedianya Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan pengaduan	30 Anak
	Terlaksananya Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi yang Memerlukan Koordinasi Sinkronisasi	Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	

		Terlaksananya Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 dokumen
		Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 dokumen
	3	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah laporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kab/kota	3 Laporan
		Tersedianya Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	1 Laporan
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi	1 Dokumen
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 Dokumen

**PROGRAM**

**A. Perlindungan Perempuan**

	<b>Rp</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp	<b>500,000,000.00</b>	APBD
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Rp	260,000,000.00	
- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Rp	110,000,000.00	
2 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Rp	150,000,000.00	
- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Rp	240,000,000.00	
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Rp	80,000,000.00	
- Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Rp	80,000,000.00	

**B. Perlindungan Khusus Anak**

1 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp	<b>832,499,775.00</b>	APBD
- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Rp	693,749,725.00	
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Rp	300,000,125.00	
2 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Rp	393,749,600.00	
- Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Rp	75,000,050.00	
3 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp	75,000,050.00	
- Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Rp	63,750,000.00	
	Rp	63,750,000.00	

Kepala Dinas  
Pembudayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah



**D. ZUBAIR, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19701009 199003 1 003

Palu, 2 Mei 2023  
Kepala Bidang  
Perlindungan Perempuan dan  
Khusus Anak

**DIANA ADAM PATTALAO, S.Sos**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19750101 199603 2 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 UNIT KERJA : BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK  
 TAHUN ANGGARAN : 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	<b>TERPENUHINYA INDIKATOR-INDIKATOR KOTA LAYAK ANAK (KLA) OLEH KAB/KOTA</b>	<b>Persentase Kab/Kota yang Ditetapkan Sebagai KLA</b>	<b>23,07</b>
	1 Terlaksananya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	2 Dokumen
	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	7 Orang/ 1 Laporan
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	5 Dokumen
	2 Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	4 Dokumen
	Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	40 Anak/ 1 Laporan
	Tersedianya Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	3 Dokumen
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	2 Dokumen
	Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten /Kota	2 Dokumen

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
<b>A. Pemenuhan Hak Anak</b>	<b>Rp 924,999,900.00</b>	APBD
1 Pelembagaan PHA pada lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Rp 403,952,150.00	
- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Rp 100,126,650.00	
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Rp 303,825,500.00	
2 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Rp 521,047,750.00	
- Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Rp 98,040,050.00	
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Rp 213,798,000.00	
- Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Rp 111,959,950.00	
- Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp 97,249,750.00	

Kepala Dinas  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi  
Sulawesi Tengah



**Dr. ZUBAIR, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19701009 199003 1 003

Palu, 2 Mei 2023  
Kepala Bidang  
Pemenuhan Hak Anak



**JOYCE SAGITA NOVYANTI, SE, MM**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19781122 200904 2 001

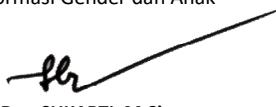
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 UNIT KERJA : BIDANG DATA INFORMASI GENDER DAN ANAK  
 TAHUN ANGGARAN : 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	<b>MENINGKATNYA KETERSEDIAAN DAN PUBLIKASI DATA GENDER DAN ANAK</b>	-	<b>40,40</b>
		-	<b>41,03</b>
		-	<b>50</b>
1	Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen hasil Analisi dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	2 Dokumen
	- Tersedianya Data Gender dan Anak Provinsi	- Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	1 Dokumen
2	Terlaksananya Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	1 Dokumen

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
<b>A. Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak</b>	<b>Rp 475,000,000.00</b>	APBD
1 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Rp 475,000,000.00	
- Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Rp 175,000,000.00	
- Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Rp 300,000,000.00	

Kepala Dinas  
 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi  
 Sulawesi Tengah  
  
**Dr. ZUBAIR, M.Si**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19701009 199003 1 003

Palu, 2 Mei 2023  
 Kepala Bidang  
 Data, Informasi Gender dan Anak  
  
**Dra. SUKARTI, M.Si**  
 Pembina Tingkat  
 NIP. 19660105 199103 2 011

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 UNIT KERJA : UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
 TAHUN ANGGARAN : 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	MENINGKATNYACAPAIAN NILAI SAKIP, INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT, DAN PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	Indeks Kepuasan Masyarakat	80
		Persentase Realisasi Anggaran	97
1	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen
	- Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	1 Dokumen
2	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan
	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
3	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan
	- Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Kendaraan
B.	MENINGKATNYA PELAYANAN TERHADAP KASUS KEKERASAN PEREMPUAN DAN TPPO	- Persentase penanganan anak memerlukan perlindungan Khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	65,00
1	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten /Kota	2 Laporan
	- Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten /Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	50 Orang
	- Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	1 Laporan
C.	MENINGKATNYA PELAYANAN TERHADAP KASUS KEKERASAN KHUSUS ANAK	Persentase penanganan anak memerlukan perlindungan Khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	65,0
1	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi	4 Laporan
	- Tersedianya Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan pengaduan	30 Orang Anak
	Terlaksananya Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 Dokumen
	Terlaksananya Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 Laporan
	Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus KewenanganProvinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak ang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 Dokumen

PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp	<b>213,244,000.00</b>	APBD
1 Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	32,050,000.00	
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp	32,050,000.00	
2 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	104,624,000.00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	104,624,000.00	
3 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	76,570,000.00	
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Rp	76,570,000.00	
<b>B. Perlindungan Perempuan</b>	<b>Rp</b>	<b>330,354,400.00</b>	
1 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan	Rp	330,354,400.00	
- Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi	Rp	184,716,000.00	
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan	Rp	145,638,400.00	
<b>C. Perlindungan Khusus Anak</b>	<b>Rp</b>	<b>136,851,600.00</b>	
1 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan	Rp	136,851,600.00	
- Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan	Rp	64,990,000.00	
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan	Rp	71,861,600.00	
Total	Rp	<b>680,450,000.00</b>	

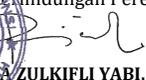

 Kepala Dinas  
 Pembinaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
**Dr. TUBAIR, M.Si**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19701009 199003 1 003

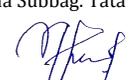
Palu, 2 Mei 2023  
 Kepala Bidang  
 Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan  
  
**PATRICIA ZULKIFLI YABI, S.STP, M.Si**  
 Pembina Tingkat I  
 19860521 200412 2 001

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 UNIT KERJA : UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
 TAHUN ANGGARAN : 2023

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
A.	MENINGKATNYACAPAIAN NILAI SAKIP, INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT, DAN PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	Indeks Kepuasan Masyarakat	80
		Persentase Realisasi Anggaran	97
1	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen
	- Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	1 Dokumen
2	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan
	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
3	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan
	- Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Kendaraan

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
A.	Rp 213,244,000.00	APBD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		
1 Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 32,050,000.00	
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 32,050,000.00	
2 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 104,624,000.00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 104,624,000.00	
3 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 76,570,000.00	
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 76,570,000.00	

Kepala Bidang  
 Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak  
  
**PATRICIA ZULKIFLI YABL, S.STP, M.Si**  
 Pembina Tingkat I  
 19860521 200412 2 001

Palu, 2 Mei 2023  
 Kepala Subbag. Tata Usaha  
  
**MUHLIZAR, S. Pi. M. Si**  
 Pembina  
 19730404 2001121 1 004

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 UNIT KERJA : SEKSI PENERIMAAN DAN KLARIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
 TAHUN ANGGARAN : 2023

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
B.	MENINGKATNYA PELAYANAN TERHADAP KASUS KEKERASAN PEREMPUAN DAN TPPO	- Persentase penanganan anak memerlukan perlindungan Khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	65,00
		- Persentase penanganan anak memerlukan perlindungan Khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	65,00
1	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten /Kota	- Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten /Kota	2 Laporan
	- Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten /Kota	- Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten /Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	50 Orang
	- Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	- Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	1 Laporan

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
<b>A. Perlindungan Perempuan</b>	<b>Rp 330,354,400.00</b>	APBD
1 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp 330,354,400.00	
- Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten /Kota	Rp 184,716,000.00	
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Rp 145,638,400.00	

Palu, 2 Mei 2023

Kepala Bidang  
 Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak  
  
**PATRICIA ZULKIELLYABI, S.STP., M.Si**  
 Pembina Tingkat I  
 19860521 200412 2 001

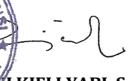
Kepala Seksi Penerimaan Dan Klarifikasi  
  
**RAFIA AMALIA BINOL, SE**  
 Penata  
 19670810 199303 2 009

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 UNIT KERJA : SEKSI TINDAK LANJUT KASUS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
 TAHUN ANGGARAN : 2023

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
C.	MENINGKATNYA PELAYANAN TERHADAP KASUS KEKERASAN KHUSUS ANAK	Persentase penanganan anak memerlukan perlindungan Khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	65,0
1	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi	4 Laporan
	- Tersedianya Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan pengaduan	30 Orang Anak
	Terlaksananya Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 Dokumen
	Terlaksananya Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 Laporan
	Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 Dokumen

<b>C. Perlindungan Khusus Anak</b>	<b>Rp</b>	<b>136,851,600.00</b>
1 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Rp	136,851,600.00
- Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Rp	64,990,000.00
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Rp	71,861,600.00

Palu, 2 Mei 2023

Kepala Bidang  
 Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak  
  
**PATRICIA ZULKIFLI YABL, S.STP, M.Si**  
 Pembina Tingkat I  
 19860521 200412 2 001

Kepala Seksi Penerimaan Dan Klarifikasi  
  
**ZULFIKAR, SH, MH**  
 Penata Tingkat I  
 19740103 200804 2 001